
Penindasan Rohingya sebagai Warisan Kolonialisme dan Dampak Islamofobia

Maulana¹, Susmihara², Hasaruddin³, Mukhtar Galib⁴

^{1,4}Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: maulana@lasharanjaya.ac.id¹, susmihara@uin-alauddin.ac.id², hasaruddin@uin-alauddin.ac.id³, mukhtar@lasharanjaya.ac.id⁴

Article History:

Received: 20 Juli 2024

Revised: 07 Agustus 2024

Accepted: 09 Agustus 2024

Keywords: Penindasan Rohingya, Kolonialisme, Narasi Islamofobia,

***Abstract:** Penelitian ini menginvestigasi akar penyebab penindasan terhadap Rohingya di Myanmar dengan mempertimbangkan sejarah kolonialisme, politik internal, dan narasi Islamofobia. Melalui tinjauan literatur yang mendalam, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang saling terkait yang memengaruhi penindasan terhadap Rohingya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap teori-teori kolonialisme dan Islamofobia serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah kolonialisme Inggris di Myanmar telah menciptakan landasan struktural yang memperkuat ketidaksetaraan etnis, sementara narasi Islamofobia digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif terhadap Rohingya. Interaksi antara faktor-faktor ini memperkuat kondisi yang memungkinkan penindasan terhadap Rohingya terus berlanjut di Myanmar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akar penyebab konflik ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mengakhiri penindasan terhadap Rohingya dan mempromosikan perdamaian serta keadilan di Myanmar.*

PENDAHULUAN

Penindasan terhadap komunitas Rohingya di Myanmar telah menjadi isu kemanusiaan yang mendapat perhatian global dalam beberapa dekade terakhir (Saragih, H. M. (2017). Rohingya, kelompok etnis minoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, telah mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terstruktur. Permasalahan ini tidak hanya terkait dengan konflik etnis dan agama, tetapi juga merupakan warisan kolonialisme yang memperparah ketegangan antar kelompok di Myanmar. Ketidakadilan yang dialami oleh Rohingya mencakup banyak aspek, dari penghilangan status kewarganegaraan hingga kekerasan fisik yang memaksa mereka melarikan diri dari rumah mereka.

Salah satu isu utama yang mempengaruhi Rohingya adalah masalah kewarganegaraan. Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 diberlakukan, Rohingya secara

sistematis diperlakukan sebagai orang asing di tanah air mereka sendiri (Haque, M. M. 2017). Hukum ini menghilangkan hak mereka untuk menjadi warga negara, mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak dasar seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Dampak dari kebijakan ini sangat besar, karena membuat Rohingya hidup dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrem.

Selain masalah kewarganegaraan, kekerasan fisik terhadap Rohingya juga menjadi masalah serius. Serangkaian serangan militer pada tahun 2016 dan 2017 memaksa ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama Bangladesh. Krisis pengungsi yang terjadi akibat kekerasan ini menciptakan tekanan besar pada negara-negara penerima, dan kondisi di kamp-kamp pengungsi seringkali sangat memprihatinkan, dengan minimnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan (Toole, M. J., & Waldman, R. J. 1997).

Diskriminasi terhadap Rohingya sering kali dilandasi oleh prasangka agama yang lebih luas di Myanmar. Islamofobia di Myanmar menjadi alat untuk justifikasi kekerasan dan pengucilan terhadap mereka (Bakali, N. 2021). Sentimen anti-Muslim yang kuat di kalangan mayoritas Buddha digunakan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok nasionalis untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan diskriminatif dan tindakan kekerasan. Ini menciptakan lingkaran setan di mana diskriminasi dan kekerasan terus berlanjut dan memburuk.

Warisan kolonialisme Inggris juga memainkan peran penting dalam memperburuk situasi. Kebijakan kolonial yang membagi-bagi kelompok etnis untuk mempermudah kontrol turut berperan dalam memperparah segregasi sosial dan ketegangan antar kelompok etnis di Myanmar (Zeiner-Morrish, O. 2022). Inggris sering kali memanfaatkan perbedaan etnis dan agama untuk memecah belah dan menguasai, meninggalkan warisan perpecahan yang mendalam yang terus mempengaruhi dinamika sosial di Myanmar hingga saat ini.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji dinamika kompleks yang menyebabkan penindasan terhadap Rohingya. Misalnya, penelitian oleh Ware, A., & Laoutides, C. (2019). membahas tentang bagaimana narasi historis dan politik berkontribusi terhadap marginalisasi Rohingya. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks sejarah untuk mengidentifikasi akar masalah yang mendasari konflik ini. Sementara itu, studi oleh Majeed, S. (2019). menganalisis peran Islamofobia dalam memperburuk diskriminasi yang dialami oleh Rohingya, menunjukkan bagaimana prasangka agama bisa memicu kebijakan dan tindakan yang sangat merugikan.

Literatur mengenai penindasan Rohingya menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor-faktor historis, politik, dan sosial. Buku "The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide" karya Azeem Ibrahim (2018) menyoroti bagaimana kolonialisme Inggris meninggalkan warisan yang memperkuat segregasi etnis. Ibrahim menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana sejarah kolonial telah membentuk kondisi yang memungkinkan penindasan sistematis terhadap Rohingya.

Sementara itu, studi "Myanmar's Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of a Muslim 'Other'" oleh Francis Wade (2019) memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana Islamofobia digunakan sebagai alat politik di Myanmar. Wade menguraikan bagaimana narasi kebencian dan kekerasan terhadap Muslim digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah lain yang dihadapi negara tersebut.

Penelitian yang lebih baru, seperti yang dilakukan oleh Ong, A. (2023), menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah internal Myanmar, tetapi juga menyangkut dinamika geopolitik regional dan internasional. Pentingnya pendekatan multilateral dalam menangani

krisis ini, mengingat dampaknya yang meluas hingga ke negara-negara tetangga. Krisis Rohingya telah menjadi isu yang melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional, yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mencari solusi (Sanyoto., et al., 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian tentang penindasan Rohingya juga mengangkat isu-isu tentang hak asasi manusia, keadilan, dan tanggung jawab internasional. Ini memerlukan analisis yang mendalam tentang bagaimana komunitas internasional dapat dan seharusnya merespons krisis kemanusiaan semacam ini. Tindakan internasional yang kuat dan terkoordinasi diperlukan untuk menekan Myanmar agar menghentikan kekerasan dan memberikan hak-hak dasar kepada Rohingya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penindasan terhadap Rohingya sebagai manifestasi dari kolonialisme dan Islamofobia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang akar penyebab dan solusi potensial untuk krisis kemanusiaan ini. Menggunakan kerangka teori kolonialisme dan Islamofobia, penelitian ini berusaha menggali lebih dalam tentang bagaimana dua faktor ini saling berinteraksi untuk menciptakan kondisi penindasan yang dialami oleh Rohingya.

Pendekatan ini juga akan mempertimbangkan dinamika lokal dan global yang mempengaruhi situasi Rohingya. Misalnya, bagaimana kebijakan nasionalis di Myanmar dipengaruhi oleh tekanan internasional dan bagaimana komunitas internasional dapat menggunakan leverage mereka untuk mendorong perubahan. Penelitian ini akan menggabungkan analisis historis, politik, dan sosial untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang mendalam tentang penyebab utama dari penindasan yang dialami oleh Rohingya. Dengan memahami akar masalah, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk mengatasi krisis ini dan mencegah kekerasan serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih informatif bagi pembuat keputusan di tingkat nasional dan internasional. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh Rohingya dapat diatasi secara efektif.

LANDASAN TEORI

Teori Kolonialisme

Kolonialisme merupakan praktik dominasi dan eksploitasi suatu negara atas wilayah dan penduduknya untuk tujuan ekonomi, politik, dan sosial (Miftakhuddin, M. 2020). Dalam konteks Myanmar, kebijakan kolonial Inggris yang membagi-bagi kelompok etnis untuk mempermudah kontrol telah meninggalkan warisan yang memperkuat segregasi sosial dan ketegangan antar kelompok etnis. Edward Said, dalam karyanya "Orientalism" (1977), menjelaskan bagaimana dominasi kolonial tidak hanya merambah fisik, tetapi juga psikologis dan budaya, menciptakan hierarki rasial dan etnis yang bertahan lama. Warisan kolonial ini menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan diskriminasi sistematis terhadap Rohingya.

Teori Islamofobia

Islamofobia dapat diartikan sebagai prasangka, diskriminasi, dan ketakutan yang tidak berdasar terhadap Islam dan umat Muslim. Menurut Chris Allen dalam "Contemporary Islamophobia before 9/11: A brief history" (2010), Islamofobia bukan hanya masalah individual, tetapi juga fenomena sosial dan politik yang digunakan untuk membenarkan diskriminasi dan

kekerasan. Di Myanmar, Islamofobia telah menjadi alat politik bagi kelompok-kelompok nasionalis untuk memobilisasi dukungan dan menjustifikasi penindasan terhadap Rohingya (Biver, E. 2014). Sentimen anti-Muslim yang kuat menciptakan lingkungan di mana kebijakan diskriminatif dapat diterima dan bahkan didukung oleh masyarakat luas.

Teori Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia

Teori kewarganegaraan, seperti yang diuraikan oleh T.H. Marshall dalam "Citizenship and Social Class" (2000), menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah status yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu dalam suatu negara. Di Myanmar, Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 menghilangkan status kewarganegaraan Rohingya, yang mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak (Holliday, I. 2014). Ketidakadilan ini memperparah kondisi kehidupan mereka dan memaksa banyak Rohingya menjadi pengungsi. Hak asasi manusia, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), termasuk hak untuk hidup bebas dari diskriminasi, hak atas kewarganegaraan, dan hak untuk tidak dipaksa menjadi pengungsi. Pelanggaran hak-hak ini terhadap Rohingya menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya dan mematuhi norma-norma internasional.

Teori Kekerasan Struktural

Johan Galtung dalam "Violence, Peace, and Peace Research" (1969) mengemukakan konsep kekerasan struktural, yaitu bentuk kekerasan yang diakibatkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Kekerasan struktural tidak selalu terlihat seperti kekerasan fisik, tetapi tetap merugikan individu atau kelompok dengan cara menghalangi mereka dari kebutuhan dasar (Isnaini, A. 2014). Diskriminasi hukum dan kebijakan terhadap Rohingya, seperti pencabutan kewarganegaraan dan pembatasan hak-hak mereka, merupakan bentuk kekerasan struktural yang mengakar dalam sistem politik dan sosial Myanmar.

Teori Geopolitik

Teori geopolitik mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis dan politik internasional mempengaruhi hubungan antar negara dan konflik (Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. 2023). Krisis Rohingya tidak hanya merupakan masalah internal Myanmar, tetapi juga menyangkut dinamika geopolitik regional dan internasional (Mali, F. X. G. T. 2017). Negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, serta aktor internasional, seperti PBB dan organisasi non-pemerintah, memainkan peran penting dalam respon terhadap krisis ini. Analisis geopolitik membantu memahami bagaimana kepentingan nasional dan internasional mempengaruhi kebijakan terhadap Rohingya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan penekanan pada analisis dokumen dan literatur untuk menyelidiki fenomena penindasan terhadap komunitas (Khilmiyah, A. 2016). Desain penelitian berupa studi kasus kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang faktor-faktor kompleks yang mendasari penindasan terhadap Rohingya, dengan fokus pada sejarah, politik, dan dinamika sosial yang membentuk pengalaman mereka. Pengumpulan data akan dilakukan melalui analisis dokumen.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang terkait dengan penindasan Rohingya (Maulana, M.,

et al., 2024). Validitas dan reliabilitas penelitian akan dipastikan melalui strategi triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber data dan metode analisis, serta dengan memperhatikan etika penelitian dalam penggunaan dokumen dan literatur yang tersedia secara publik. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan analitis, dengan narasi yang menggambarkan temuan utama dari analisis dokumen dan literatur, serta menyajikan rekomendasi yang relevan bagi pemahaman dan perubahan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 adalah undang-undang yang memainkan peran sentral dalam pengaturan status kewarganegaraan di Myanmar (Alam, J. 2018). Undang-undang ini secara resmi mendefinisikan siapa yang diakui sebagai warga negara Myanmar dan mengatur prosedur untuk memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari undang-undang ini adalah ketentuan yang secara efektif mencabut status kewarganegaraan bagi sebagian besar orang Rohingya, kelompok etnis Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar (Haque, M. M. 2017).

Undang-undang ini menetapkan tiga kategori warga negara: warga negara (yang memenuhi syarat sebagai keturunan yang bisa ditelusuri dari etnis mayoritas Myanmar), penduduk asing, dan mereka yang menjadi warga negara sebelum 1982 berdasarkan undang-undang sebelumnya. Namun, kriteria untuk memenuhi syarat sebagai warga negara sangat ketat dan sering kali sulit dipenuhi oleh banyak Rohingya, karena mereka seringkali tidak memiliki dokumen identitas yang diperlukan atau tidak diakui oleh pemerintah sebagai warga negara.

Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 di Myanmar menyebabkan banyak orang Rohingya kehilangan status kewarganegaraan, membuat mereka menjadi tanpa kewarganegaraan atau "statelessness" (Sigit, R. N., & Novianti, N. 2020). Akibatnya, akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan terbatas secara signifikan. Mereka sering menjadi korban diskriminasi sistematis dan kekerasan karena dianggap sebagai pendatang ilegal oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar. Undang-undang ini telah menciptakan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan di Myanmar, memperkuat kondisi struktural yang mendukung penindasan terhadap Rohingya. Meskipun mendapat kritik keras dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia, undang-undang ini belum mengalami perubahan yang signifikan hingga saat ini.

Narasi Islamofobia

Narasi Islamofobia di Myanmar merupakan fenomena yang kompleks yang digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat dan membenarkan penindasan terhadap Rohingya (Bakali, N. 2021). Dalam konteks politik Myanmar, para pemimpin politik dan kelompok nasionalis telah memanfaatkan narasi Islamofobia untuk menggerakkan dukungan publik dan melegitimasi tindakan represif terhadap Rohingya. Dengan menggambarkan Muslim sebagai ancaman terhadap identitas Buddha dan keamanan nasional Myanmar, narasi ini menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap komunitas Rohingya, yang dilihat sebagai representasi dari ancaman yang harus diatasi oleh negara.

Gambaran negatif terhadap Muslim yang dikembangkan melalui narasi Islamofobia juga memperkuat prasangka dan stereotip negatif terhadap Rohingya di mata masyarakat Myanmar. Dengan mendemonstrasikan Rohingya sebagai agen perusakan yang berpotensi merusak keamanan dan stabilitas negara, narasi ini memperdalam polarisasi antara komunitas Buddha dan

Muslim di Myanmar. Dengan demikian, masyarakat Myanmar sering kali mendukung atau setidaknya pasif terhadap tindakan penindasan terhadap Rohingya, percaya bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan identitas etnis mereka.

Akibatnya, narasi Islamofobia tidak hanya membenarkan tindakan represif terhadap Rohingya oleh pemerintah Myanmar, tetapi juga memperkuat stigma sosial dan ketakutan terhadap komunitas tersebut di antara masyarakat Myanmar. Ini menciptakan lingkungan yang memperburuk situasi kemanusiaan Rohingya, dengan akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan perawatan kesehatan semakin dibatasi, dan dengan meningkatnya risiko terhadap kekerasan fisik dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran narasi Islamofobia dalam konteks penindasan terhadap Rohingya penting untuk mengatasi konflik ini dan mempromosikan perdamaian serta keadilan di Myanmar.

Interaksi Antara Faktor-Faktor

Penindasan terhadap Rohingya tidak dapat dipahami secara terpisah dari sejarah kolonialisme, politik internal Myanmar, dan narasi Islamofobia yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Pertama, sejarah kolonialisme Inggris di Myanmar meninggalkan warisan yang menciptakan ketegangan etnis dan agama di negara tersebut (Ng, I. Y. C. 2022). Kebijakan kolonial yang merangkul politik pemisahan dan diskriminasi telah menanamkan landasan struktural untuk konflik etnis yang berkelanjutan, termasuk penindasan terhadap Rohingya.

Kedua, politik internal Myanmar, terutama dalam konteks perebutan kekuasaan antara pemerintah dan kelompok etnis bersenjata, telah memperburuk situasi Rohingya (Trihartono, A. 2018). Sementara itu, narasi Islamofobia digunakan oleh pemerintah dan kelompok nasionalis untuk membenarkan tindakan diskriminatif mereka terhadap Rohingya, dengan menggambarkan mereka sebagai ancaman terhadap identitas dan keamanan nasional Myanmar.

Faktor-faktor ini saling terkait dan saling memperkuat, menciptakan lingkungan yang memungkinkan penindasan terhadap Rohingya terus berlanjut. Dengan demikian, pemahaman yang holistik tentang interaksi antara sejarah kolonialisme, politik internal, dan narasi Islamofobia menjadi penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menangani konflik ini

Relevansi Teori Kolonialisme dan Islamofobia

Penindasan terhadap Rohingya di Myanmar sangatlah penting untuk dipahami secara mendalam. Teori kolonialisme memberikan wawasan tentang bagaimana sejarah kolonialisme Inggris di Myanmar telah memberikan fondasi struktural yang memperkuat ketidaksetaraan dan segregasi etnis, yang kemudian berkontribusi pada penindasan terhadap Rohingya. Penjajahan Inggris di Myanmar tidak hanya meninggalkan warisan politik yang memisahkan kelompok etnis, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok etnis sementara mengabaikan yang lain (Kipgen, N. 2016). Penelitian terdahulu telah menyoroti bagaimana praktik kolonial ini telah memperkuat dinamika kekuasaan yang merugikan bagi Rohingya, yang akhirnya berdampak pada penindasan mereka.

Sementara itu, teori Islamofobia memberikan pemahaman tentang bagaimana narasi kebencian terhadap Muslim telah digunakan oleh pemerintah Myanmar dan kelompok nasionalis untuk membenarkan tindakan diskriminatif mereka terhadap Rohingya (Bakali, N. 2021). Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi bagaimana pemahaman yang dangkal tentang Islam dan stereotip negatif terhadap umat Islam telah memperkuat prasangka dan ketakutan terhadap

Rohingya di mata masyarakat Myanmar. Dengan menggambarkan Rohingya sebagai ancaman terhadap identitas Buddha dan keamanan nasional Myanmar, narasi Islamofobia memperkuat stigma sosial terhadap Rohingya dan merugikan upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi antara kelompok etnis di negara tersebut.

Dengan menggabungkan teori kolonialisme dan Islamofobia, kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor sejarah dan politik yang kompleks berinteraksi dan saling memperkuat dalam membentuk kondisi yang memungkinkan penindasan terhadap Rohingya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menangani konflik etnis di Myanmar dan mempromosikan perdamaian serta keadilan bagi semua kelompok etnis, termasuk Rohingya.

Pentingnya Memahami Konteks Sejarah dan Politik

Pentingnya memahami konteks sejarah dan politik dalam analisis tentang penindasan terhadap Rohingya di Myanmar mencerminkan perlunya pendekatan yang holistik dalam memahami konflik tersebut. Sejarah yang panjang dari penjajahan kolonialisme oleh Inggris di Myanmar telah memberikan landasan struktural bagi ketidaksetaraan etnis dan ketegangan antar-etnis yang masih terasa hingga saat ini. Praktik kolonialisme tersebut tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan, tetapi juga meninggalkan warisan ideologis yang memperkuat diskriminasi terhadap minoritas seperti Rohingya (Alam, J. 2018). Pemahaman akan sejarah ini memberikan wawasan yang mendalam tentang akar penyebab konflik serta mengungkap bagaimana pola-pola diskriminatif telah tertanam dalam struktur sosial dan politik Myanmar.

Selain itu, pemahaman akan dinamika politik internal Myanmar juga sangat penting dalam menganalisis penindasan terhadap Rohingya. Persaingan politik yang berkepanjangan antara pemerintah dan kelompok etnis bersenjata telah memperburuk situasi kemanusiaan bagi Rohingya. Kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan politik dan keamanan nasional sering kali mengorbankan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat sipil, termasuk Rohingya (Islam, M. S. 2019). Dengan memahami konteks politik ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan bagi Rohingya bukan hanya merupakan produk dari narasi kebencian terhadap Muslim, tetapi juga refleksi dari dinamika politik yang kompleks di Myanmar.

Pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan politik ini memberikan landasan yang kuat bagi advokasi hak asasi manusia dan upaya penyelesaian konflik yang lebih holistik di Myanmar. Dengan menggabungkan pengetahuan tentang sejarah penjajahan kolonial, dinamika politik internal, dan narasi kebencian, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengakhiri penindasan terhadap Rohingya. Ini mencakup upaya-upaya untuk mempromosikan dialog antar-etnis, memperkuat lembaga-lembaga demokratis, dan mendukung pengakuan hak asasi manusia bagi semua warga negara Myanmar, termasuk Rohingya. Dengan demikian, pemahaman yang holistik tentang konteks sejarah dan politik merupakan langkah awal yang penting dalam upaya mencapai perdamaian dan keadilan di Myanmar

KESIMPULAN

Penelitian menyoroti bahwa penindasan terhadap Rohingya di Myanmar tidak bisa dipahami secara terisolasi, tetapi sebagai produk dari interaksi kompleks antara sejarah kolonialisme, politik internal, dan narasi kebencian. Sejarah penjajahan Inggris telah menciptakan ketidaksetaraan etnis yang masih terasa hingga saat ini, sementara narasi Islamofobia digunakan

sebagai alat politik untuk membenarkan tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap Rohingya. Analisis yang holistik tentang akar penyebab konflik ini memberikan landasan yang kuat bagi advokasi hak asasi manusia dan penyelesaian konflik yang lebih inklusif di Myanmar.

Dalam konteks ini, upaya untuk mengakhiri penindasan terhadap Rohingya memerlukan pendekatan yang lebih luas yang mempertimbangkan sejarah, politik, dan narasi kebencian. Langkah-langkah menuju perdamaian dan keadilan di Myanmar harus memperhitungkan dampak sejarah kolonialisme dan strategi politik internal yang merugikan bagi Rohingya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika konflik ini, komunitas internasional dapat lebih efektif dalam mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk mengakhiri penindasan terhadap Rohingya dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan di negara tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, J. (2018). The Rohingya of Myanmar: theoretical significance of the minority status. *Asian Ethnicity*, 19(2), 180-210.
- Allen, C. (2010). Contemporary Islamophobia before 9/11: A brief history. *Arches Quarterly*, 4(7), 14-22.
- Bakali, N. (2021). Islamophobia in Myanmar: the Rohingya genocide and the 'war on terror'. *Race & Class*, 62(4), 53-71.
- Biver, E. (2014). Religious nationalism: Myanmar and the role of Buddhism in anti-Muslim narratives.
- Des Forges, A. (2018). *The Rohingya crisis: A case study of genocide and Islamophobia*. Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of peace research*, 6(3), 167- 191.
- Haque, M. M. (2017). Rohingya ethnic Muslim minority and the 1982 citizenship law in Burma. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(4), 454-469.
- Holliday, I. (2014). Addressing Myanmar's citizenship crisis. *Journal of Contemporary Asia*, 44(3), 404-421.
- Ibrahim, A. (2018). *The Rohingyas: inside Myanmar's genocide*. Oxford University Press.
- Islam, M. S. (2019). Understanding the Rohingya crisis and the failure of human rights norm in Myanmar: Possible policy responses. *Jadavpur Journal of International Relations*, 23(2), 158-178.
- Isnaini, A. (2014). Kekerasan atas nama agama. *Kalam*, 8(2), 213-228. Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru.
- Kipgen, N. (2016). *Myanmar: A political history*. Oxford University Press.
- Mahmood, S., Moosa, K., & Oo, K. Z. (2017). *Rohingya: A history of denial*. London: Zed Books
- Majeed, S. (2019). Islamophobia and the mental health of Rohingya refugees. *Islamophobia and Psychiatry: Recognition, Prevention, and Treatment*, 277-291.
- Mali, F. X. G. T. (2017). Peluang Asean Community Menyelesaikan Masalah Rohingya. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 1-14.
- Marshall, T. H. (2000). Citizenship and social class. *The welfare state reader*, 32-41. Maulana, M., Alwi, Z., Sakka, A. R., & Galib, M. (2024). Dropshipping dalam Perspektif Hadis: Antara Gharar, Khiyar, dan Akad Wakalah. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 61-72.
- Miftakhuddin, M. (2020). Kolonialisme: Eksploitasi dan pembangunan menuju hegemoni.
- Ng, I. Y. C. (2022). State approaches towards managing ethnic diversity in Myanmar and Malaysia:

- British legacies, postcolonial nationalism and contemporary issues. *Asian Ethnicity*, 23(1), 186-206.
- Ong, A. (2023). Peace studies in Myanmar: interweaving regional geopolitics and local dynamics. *Asian Journal of Peacebuilding*.
- Said, E. W. (1977). Orientalism. *The Georgia Review*, 31(1), 162-206.
- Sanyoto, D. R., Harini, S., & Dipokusumo, G. P. H. (2019). Diplomasi Indonesia Terhadap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Rohingya. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Saragih, H. M. (2017). Indonesia dan Responsibility To Protect Etnis Muslim Rohingnya Myanmar. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2.
- Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. (2023). Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global. *Indonesia Emas Group*.
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.
- Toole, M. J., & Waldman, R. J. (1997). The public health aspects of complex emergencies and refugee situations. *Annual review of public health*, 18(1), 283-312.
- Trihartono, A. (2018). Myanmar's worsening Rohingya crisis: a call for responsibility to protect and ASEAN's response. *Sustainable Future for Human Security: Society, Cities and Governance*, 3-16.
- Wade, F. (2019). *Myanmar's enemy within: Buddhist violence and the making of a Muslim 'other'*. Bloomsbury Publishing.
- Ware, A., & Laoutides, C. (2019). Myanmar's 'Rohingya' conflict: Misconceptions and complexity. *Asian Affairs*, 50(1), 60-79.
- Yusuf, I. (2018). Three faces of the Rohingya crisis: Religious nationalism, Asian Islamophobia, and delegitimizing citizenship. *Studia Islamika*, 25(3), 503-542.
- Zeiner-Morrish, O. (2022). *Enduring Ethnic Conflict: The Institutional Origins of Conflict in Myanmar*.